

## Polemik Keberagamaan dan Integrasi Sosial Pasca Runtuhnya Dinasti Mughal India (1556-1605): Polemik Pemisahan Hindu Islam

### *Religious Polemic and Social Integration After the Collapse of the Mughal Dynasty (1556-1605) India: The Polemic of the Separation of Hindu Islam*

Qurrota A'yun<sup>1</sup>, Abd A'la<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Studi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya,

<sup>2</sup>Fakultas Studi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya,

<sup>1</sup>Email: [qurrota.ayun050799@gmail.com](mailto:qurrota.ayun050799@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang polemik keberagamaan antara Hindu dan Islam pasca runtuhnya Dinasti Mughal dan integrasi sosial yang ditimbulkan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode sejarah, yang melibatkan tahapan heuristik berupa pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen Sejarah serta interpretasi analisis dan penafsiran data historis untuk memahami konteks dan dinamika konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa runtuhnya Dinasti Mughal menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu konflik agama antara Hindu dan Islam. Konflik ini tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, tetapi juga perdebatan ideologis dan perebutan kekuasaan politik. Polemik pemisahan Hindu-Islam menjadi salah satu bentuk manifestasi dari konflik ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agama dan integrasi sosial pasca runtuhnya Dinasti Mughal di India adalah fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta pemahaman sejarah sebagai dasar rekonsiliasi sosial yang efektif.

Kata-kata kunci: *Polemik agama; Integrasi sosial; Dinasti Mughal*

**Abstract:** *This study examines the polemic between Hinduism and Islam after the collapse of the Mughal Dynasty and the resulting social integration. The approach used is qualitative, using historical methods, which involve heuristic stages (collecting data from various sources such as books, scientific journals, news articles, and historical documents) and interpretation (analysis and interpretation of historical data to understand the context and dynamics of conflicts). The results of the study show that the collapse of the Mughal Dynasty created a power vacuum that triggered religious conflicts between Hinduism and Islam. This conflict involves not only physical battles, but also ideological debates and political power struggles. The polemic of the Hindu-Islamic separation is a form of manifestation of this conflict. This study concludes that religious conflicts and social integration after the collapse of the Mughal Dynasty in India are complex phenomena, influenced by political, economic, social, and cultural factors. Therefore, resolving these conflicts requires a holistic and sustainable approach, as well as an understanding of history as the basis for effective social reconciliation.*

*Keywords: Religious conflict; Social integration; Mughal dynasty*

### Pendahuluan

Kedatangan Islam di Jazirah Arab telah secara fundamental mengubah struktur sosial masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh praktik perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan, dan ketimpangan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang kaya. Islam membawa pesan kesetaraan, penghormatan terhadap sesama manusia, dan mendorong

kemajuan ilmu pengetahuan melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi terakhir, beliau membuka jalan bagi perkembangan kajian ilmiah baik dalam ranah agama maupun duniawi, menjadikan Islam sebagai ajaran Rahmatan Lil'alamin yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga humanis dan progresif. Misi dakwah Islam pun meluas, menyentuh berbagai wilayah termasuk anak benua India.

India menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan misi dakwah Islam dengan berlangsungnya penyebaran Islam yang terorganisir melalui jalur perdagangan, pertanian, serta dakwah keagamaan yang sistematis. Masuknya Islam ke wilayah ini tidak secara langsung sebagai penaklukan militer, melainkan melalui interaksi sosial dan ekonomi yang panjang. Masuknya Islam kedalam wilayah ini memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan kebudayaan. Islam masuk bukan pertama di dalam wilayah ini namun kekuatan Islam dapat berkuasa selama tiga abad hingga meninggalkan sejarah dan peradaban yang mapan (Wisnu, 2023).

Peran pedagang Muslim dan ulama sangat vital dalam membangun pondasi keislaman di India. Islam dikenal masuk sudah sejak abad ke-7, tetapi kekuatan politik Islam mulai terlihat jelas sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Muslim yang dikenal sebagai dinasti Islam pada periode 1206 hingga 1857 M. Terdapat lima dinasti utama, yaitu Dinasti Budak, Dinasti Khilji, Dinasti Tughlaq, Dinasti Lodhi, dan Dinasti Mughal (1556-1605). Dinasti Mughal menjadi yang terakhir sekaligus paling berpengaruh dalam membentuk kebudayaan, sistem sosial-politik, serta perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di India (Lubis, Muhajir, Dahlan, & Utara, 2021).

Dinasti Mughal berhasil membuat perubahan besar, pencapaiannya tidak hanya berada pada satu aspek saja melainkan berbagai aspek seperti, politik, militer, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Dari dinasti Mughal ini, India berhasil mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari kerajaan-kerajaan yang tidak hanya dari kalangan muslim saja melainkan kerajaan Hindu juga. Sultan Akbar sebagai pemimpin dinasti, telah banyak usaha yang dilakukan sehingga menciptakan perubahan-perubahan baru (Putri, 2019). Dan secara umum kebijakan ini berhasil menumbuhkan perdamaian di kalangan warga India yang sangat beragam dalam hal ras dan agama kepercayaan (Fatimah & Basri, 2022).

Pada masa awal pemerintahannya, banyak penurunan yang ditandai dengan krisis ekonomi hingga membuat rakyatnya mengalami kelaparan. Namun berkat keghibannya dalam memimpin negara, sultan akbar berhasil menciptakan berbagai perubahan-perubahan baru hingga berhasil mencapai kejayaan. Seperti kebijakan dalam bidang agama dengan mengeluarkan UU *Din Ilahi*, yang bermaksud bahwa agama raja adalah agama minoritas di India jika tidak diterapkan toleransi dalam bidang agama maka akan menimbulkan polemik diskriminasi (Putri, 2019, hal. 162).

Namun, setelah abad ke-18, masa kejayaan Mughal mulai mengalami kemunduran yang ditandai dengan krisis ekonomi, perebutan kekuasaan internal, dan pengaruh penjajah Eropa, terutama Inggris. Penguasaan kolonial Inggris atas India yang terjadi secara bertahap dari abad ke-18 hingga abad ke-19 membawa dampak serius. Pada era kolonial ini, umat Islam mengalami penurunan dalam hal politik, ekonomi, dan sosial-keagamaan. Dominasi Inggris memicu perubahan struktur sosial dan politik yang melemahkan posisi

komunitas Muslim. Banyak praktik keagamaan yang dipandang menyimpang oleh pemerintahan kolonial sehingga mendorong ketegangan dan konflik sosial (Ramadhan et al., 2023).

Penguasaan Inggris atas India dimulai secara dominan setelah peristiwa Perang Anglo-India dan peningkatan pengaruh Britania melalui East India Company sampai India resmi menjadi bagian dari Imperium Britania pada tahun 1858, tepat setelah berakhirnya Dinasti Mughal. Akibatnya banyak umat muslim yang merasa tidak cukup atas perlindungan identitas dari mayoritas hindu hingga akhirnya banyak orang-orang Islam memilih untuk memerdekakan diri dengan memisah ke daerah-daerah dimana mayoritas Islam bertempat (I. S. Nugroho, 2019). Situasi ini membuat banyak komunitas Muslim merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan identitas yang memadai dibawah mayoritas Hindu yang didukung kolonial Inggris. Ketegangan ini kemudian memunculkan gerakan kemerdekaan dan pembentukan wilayah-wilayah Muslim seperti Pakistan dan Bangladesh dalam rangka pencarian kedaulatan politik dan identitas keagamaan yang lebih aman dan terjamin. Pembagian India pada tahun 1947 menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan, merupakan titik krusial dari proses pemisahan sosial-religius ini yang masih meninggalkan warisan konflik hingga kini.

Kajian yang ada selama ini masih belum secara khusus mengkaji polemik pemisahan Hindu-Islam yang muncul pasca keruntuhan Dinasti Mughal, terutama dalam konteks dinamika sosial-keagamaan yang diperparah oleh tekanan kolonial serta proses pembentukan negara-negara baru di anak benua India. Studi-studi terdahulu umumnya lebih memfokuskan pembahasan pada aspek politik atau sejarah kolonial secara umum, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap interaksi sosial-keagamaan dan konflik identitas yang menjadi faktor fundamental dalam terjadinya pemisahan tersebut.

Maka penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan mendalami polemik pemisahan Hindu-Islam dalam konteks sosial-keagamaan pasca runtuhnya Dinasti Mughal (1556-1857 M) hingga masa kolonial awal Inggris. Kebaruan kajian ini terletak pada penggunaan data historis dan sosial baru yang diperoleh dari arsip lokal, sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer, serta pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sejarah, sosiologi agama, dan politik sosial. Selain itu, penelitian ini mengadopsi metode kualitatif analisis tematik untuk mengurai dimensi konflik agama dan integrasi sosial dengan detail kontekstual yang lebih kaya dibanding riset sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana transformasi kekuasaan dan intervensi kolonial berkontribusi pada munculnya polemik pemisahan Hindu-Islam serta dampaknya terhadap integrasi sosial dalam masyarakat India. Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika konflik keagamaan dan sosial di wilayah pluralistik yang diwariskan oleh sejarah panjang pemerintahan Islam dan kolonialisme di India.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis untuk memahami secara mendalam kompleksitas konflik agama antara Hindu dan Islam di India pasca runtuhnya Dinasti Mughal, khususnya periode 1556 hingga 1857 M. Fokus kajian diarahkan pada

peristiwa dan dinamika sosial-keagamaan yang memicu polemik pemisahan Hindu-Islam, dampaknya terhadap integrasi sosial masyarakat, serta upaya penyelesaian yang dilakukan selama masa transisi menuju era kolonial Inggris.

Desain penelitian ini berbasis analisis tematik, yaitu metode kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola makna yang muncul dari teks-teks sejarah dan dokumen terkait. Analisis tematik memungkinkan peneliti menyusun kategori-kategori utama dari data historis yang berkaitan dengan konflik agama serta menelaah hubungan sosial dan politik antar komunitas. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa dokumen arsip sejarah, manuskrip, dan catatan administrasi pemerintahan Dinasti Mughal serta dokumen kolonial Inggris yang telah diarsipkan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, artikel berita terkait, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas peristiwa dan kondisi sosial-keagamaan di masa tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan kajian dokumen yang mendalam (*documentary research*). Peneliti mengakses perpustakaan digital, arsip nasional, serta basis data akademik untuk memperoleh sumber data yang relevan dan kredibel. Kemudian, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan konflik agama dan pola interaksi sosial Hindu-Muslim pada periode pasca Dinasti Mughal. Analisis data dilakukan dengan tahap pengorganisasian teks historis, pengkodean isi data berdasarkan tema-tema yang muncul, dan interpretasi makna konteks sosial-politik dari peristiwa yang diteliti. Pendekatan historis ini memungkinkan untuk merekonstruksi kronologi peristiwa, menggali faktor penyebab konflik, dan mengevaluasi intervensi yang dilakukan dalam konteks sosial-keagamaan India pada masa transisi tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sosial Keberagamaan Pasca Runtuhnya Dinasti Mughal (1556-1605 M)**

Proses masuknya Islam di tanah India melalui dua tahap, yaitu tahap formal dan non formal. Penyebaran Islam tahap formal dimulai dari masa Nabi Muhammad, Khulafa al-Rasyidin dan kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan 5 dinasti di India. Wilayah India adalah seluruh wilayah Asia Selatan, masyarakat India merupakan mayoritas agama Hindu. Terdapat dua suku yang membentuk menjadi suatu kawasan masyarakat, yaitu suku Dravida dan Arya yang hidup di dataran India ini. Para pedagang Arab yang berdagang dengan masyarakat sehingga menciptakan keberlangsungan hingga akhirnya Islam masuk dalam kawasan tersebut. Pada akhirnya, India perlahan-lahan bersentuhan dengan Islam.

Setelah masa kejayaan Dinasti Mughal yang berakhir sekitar awal abad ke-18, kondisi sosial dan politik di India mengalami perubahan signifikan yang mempengaruhi dinamika keberagamaan dan integrasi sosial. Keruntuhan kekuasaan Mughal menciptakan kekosongan politik yang diikuti dengan munculnya berbagai kelompok kekuasaan lokal dan kolonial yang kemudian memicu persaingan dan ketegangan sosial antar komunitas agama, khususnya antara Hindu dan Muslim (Wisnu, 2023). Dengan melemahnya pemerintahan pusat, sejumlah aktor politik menggunakan identitas agama sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Konflik dan polemik keberagamaan yang sebelumnya relatif lebih terkendali

selama masa Mughal mulai meningkat dan berkembang menjadi segregasi sosial yang tajam. Politik identitas agama mulai mengakar, sehingga memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan antara dua komunitas mayoritas tersebut.

Sosial keagamaan pasca runtuhnya Dinasti Mughal (1556-1605 M) di India ditandai oleh perubahan signifikan dalam hubungan antar komunitas agama dan tatanan sosial. Pada masa pemerintahan Mughal awal seperti di bawah Kaisar Akbar, dikenal kebijakan toleransi agama yang mendorong harmoni sosial dengan menerima keberagaman agama, termasuk Hindu, Islam, Sikh, dan lain-lain. Akbar bahkan mengembangkan konsep *Din-i-Ilahi* yang menggabungkan elemen dari beberapa agama untuk mempromosikan persatuan. Namun, memasuki masa pemerintahan selanjutnya terutama di bawah Aurangzeb, kebijakan politik dan agama menjadi lebih konservatif dan mengedepankan dominasi Islam ortodoks. Ia memberlakukan kembali pajak *jizya* pada non-Muslim dan melakukan pembatasan kebebasan beragama, termasuk penghancuran beberapa kuil Hindu dan penindasan terhadap komunitas lain. Hal ini memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok agama, terutama antara Hindu dan Muslim. Secara sosial, umat Muslim di India mengalami kemunduran dalam aspek keagamaan dan politik akibat kebijakan yang diskriminatif dan ketegangan yang terus meningkat. Banyak tradisi keagamaan mulai tergerus dan muncul praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran asli Islam, yang turut menimbulkan perpecahan dalam komunitas Muslim sendiri. Lebih jauh, runtuhnya kekuasaan Mughal membuka ruang bagi konflik horizontal antara komunitas keagamaan yang berbeda serta memunculkan gerakan perlawanan dari berbagai kelompok seperti Maratha dan Sikh yang mempertahankan identitas dan hak-hak keagamaan mereka.

Kehadiran dan kebijakan kolonial Inggris selanjutnya memperburuk situasi keberagamaan. Inggris menerapkan sistem politik *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) yang secara strategis mengeksploitasi perbedaan antara Hindu dan Muslim untuk menjaga dominasi mereka. Diskriminasi struktural dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik menyebabkan penderitaan sosial dan kesenjangan ekonomi yang lebih dalam bagi komunitas Muslim. Konflik yang terjadi tidak hanya sebatas kekerasan fisik, tetapi juga menyentuh ranah simbolik dan kultural, seperti perselisihan mengenai tempat ibadah, ritual keagamaan, dan pengakuan hak komunitas minoritas. Hal ini menimbulkan polemik yang melahirkan kelompok-kelompok identitas keagamaan yang cenderung eksklusif dan meningkatkan fragmentasi sosial (Fatimah & Basri, 2022).

Meski terdapat upaya dari berbagai kalangan untuk membangun toleransi dan integrasi, baik melalui organisasi sosial, gerakan reformasi, maupun dialog antaragama, kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil serta diskriminasi masih menjadi hambatan utama. Integrasi sosial menjadi sulit dicapai secara menyeluruh, dan konflik agama terus mengemuka menjadi isu penting hingga periode kolonial dan kemerdekaan (Rodhiyah et al., 2023). Pasca runtuhnya Dinasti Mughal, India mengalami perubahan paradigmatis dalam hubungan antara umat Hindu dan Muslim. Polarisasi dan konflik agama semakin intens, dipengaruhi oleh kekosongan kekuasaan politik, manipulasi identitas agama oleh pihak-pihak berkepentingan, serta kebijakan kolonial yang memperdalam perpecahan

sosial. Polemik keberagamaan ini menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya integrasi sosial yang harmonis di wilayah tersebut (Lubis et al., 2021).

### **Konflik Agama di India**

Setelah runtuhnya kekuasaan Mughal pada awal abad ke-18, situasi politik, ekonomi, dan budaya di India mengalami pergeseran yang signifikan yang memicu munculnya konflik keberagamaan yang terus berlanjut hingga masa modern (Suyo Nugroho, 2019). Konflik ini tidak hanya bersifat sektarian, tetapi didorong oleh berbagai faktor struktural dan framing politik yang memperkuat ketegangan antar komunitas Hindu dan Muslim (Historia, 2024).

#### **1. Faktor Politik**

Keterisian kekosongan kekuasaan dan fragmentasi wilayah pasca kejatuhan Mughal membuka celah bagi munculnya kekuatan politik lokal yang bersifat sektarian. Faktor politik kerap menjadi persaingan antara kasus agama Hindu Islam, seperti adanya keberadaan partai-partai politik yang menggunakan *platform Hindutva* untuk mendapatkan dukungan terhadap masyarakat India yang mayoritas beragama Hindu. Partai politik yang berbasis identitas agama, seperti Bharatiya Janata Party (BJP), memanfaatkan isu keberagamaan sebagai alat politik untuk memperkuat basis massa mereka. Misalnya, kasus pembangunan kembali Kuil Ram di tanah yang sebelumnya adalah Masjid Babri menjadi simbol ketegangan antarkelompok agama. Kampanye politik yang mengangkat isu "India adalah bangsa Hindu" memicu konfrontasi dan kerusuhan besar, menewaskan lebih dari 2000 umat Muslim dan mengakibatkan pengungsian massal atau hilangnya tempat tinggal (Yunariono, 2023, hal. 230). Selain itu, kebijakan yang didasarkan pada identitas agama dalam legislasi seperti larangan pernikahan beda agama dan pengaturan atas tempat ibadah memperlihatkan betapa politik identitas menjadi sumber utama konflik sosial dan keberagamaan di masa pasca Mughal.

#### **2. Faktor Ekonomi**

Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang meluas memperparah konflik antar komunitas. Kelompok yang hidup dalam garis kemiskinan dan pengangguran tinggi rentan terhadap propaganda ekstremisme yang memanfaatkan ketidakpuasan warga. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi yang berkualitas juga menyebabkan masyarakat mudah terpapar radikalisme dan propaganda kebencian berbasis agama maupun suku. Persaingan dalam perebutan sumber daya ekonomi, seperti wilayah dan lapangan pekerjaan, menimbulkan ketegangan yang berakar pada pembagian sosial yang tidak merata. Sebagai contoh, konflik di area Kashmir tidak hanya terkait isu politik, tetapi juga melalui aspek ekonomi sosial yang memperburuk kondisi masyarakat setempat.

#### **3. Faktor Sosial Budaya**

Dinamika sosial budaya yang berkembang pasca kehilangan identitas kekuasaan Mughal memperlihatkan peningkatan segregasi sosial antara Hindu dan Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, muncul praktik segregasi dalam pendidikan, tempat ibadah, dan ruang publik, serta politik simbolik seperti kampanye rekonstruksi kuil dan masjid yang melibatkan narasi sejarah dan kekuasaan. Pengaruh budaya dan narasi sejarah yang dipolitisasi turut memperkuat stereotip dan prasangka antar kelompok. Hal ini tampak

dari pada perdebatan dan konflik yang muncul terkait isu tempat ibadah, pernikahan antar agama, dan identitas nasionalisme berbasis agama. Fenomena ini mencerminkan proses fragmentasi sosial yang menghambat tercapainya integrasi sosial yang harmonis.

Begitu pula dalam persoalan pernikahan beda agama atau disebut "jihad cinta". Sejak berkuasanya BJP, perkawinan beda agama khususnya perempuan Hindu dan laki-laki Muslim menjadi titik konflik yang berbahaya karena sudah menjadi teori konspirasi. Laki-laki Muslim yang hendak menikahi wanita Hindu mempunyai alasan yang palsu yaitu membuat para wanita Hindu tersebut menjadi Muslim atau berpindah agama (Yunariono, 2023). Namun apa yang terjadi merupakan teori ekstrimis pinggir yang kini telah dibawa ke arus politik. Mereka mengeluarkan undang-undang yang melarang akan perpindahan agama bagi pernikahan beda agama. Meskipun undang-undang tersebut mencakup beda agama namun dari beberapa kejadian yang terjadi akhir-akhir ini digunakan untuk menyasar kelompok minoritas serta mendorong kelompok sayap kanan Hindu untuk menghentikan pernikahan beda agama (Hannah Ellis-Petersen and Ahmer Khan, 2022).

Dari data yang dilansir oleh Sindo News.com, tercatat sampai saat ini India menduduki urutan kedua sebagai negara dengan penduduk terbanyak didunia, dengan populasi 1.406.631.776 jiwa pada tahun 2022. Berdasarkan *jurnal Impact of Culture and Religion on India's Food Phosphorus Footprint* oleh Dhar, dkk yang terbit 2020 menyatakan presentasinya yaitu Agama Hindu tercatat ada 79%, agama ini berhasil menduduki sebagai agama terbanyak dalam kalangan masyarakatnya. Islam menempati urutan kedua, tercatat terdapat 14% warga India yang memeluk Agama Islam. Kristen, terdapat 3% dari seluruh rakyat India. Kemudian agama Buddha, ajaran agama ini mempunyai penganut sebanyak 1% dari masyarakatnya. Sikh, sebanyak 1,7% dari masyarakat sebagai pengikut agama ini, dan yang terakhir agama Jain, tercatat dalam sensusnya sebanyak 0,4% dari masyarakatnya (Sindo, 2024). Dari data tersebut benar adanya bahwa hingga saat ini India masih tetap dimayoritasi oleh masyarakat yang beragama Hindu.

Pasca runtuhnya kekuasaan Mughal, faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya secara simultan memperkuat munculnya konflik keberagamaan di India. Politik identitas yang memanfaatkan isu agama, ketimpangan ekonomi yang memicu ketersinggungan, serta praktik segregasi sosial berlanjut memperuncing ketegangan dan memperdalam perpecahan antar komunitas Hindu dan Muslim. Konflik tersebut bukan semata-mata benturan kepercayaan, tetapi lebih sebagai manifestasi pertempuran kekuasaan yang dipicu oleh faktor struktural dan naratif sejarah yang dipolitisasi.

### **Upaya Integrasi Sosial dalam Menangani Konflik Agama di India**

Integrasi sosial menurut Paul B. Horton (Horton, P. B., & Hunt, 1999) mempunyai arti yaitu serangkaian proses dan interaksi sosial terhadap semua kelompok ras dan etnis yang bisa bersatu sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi serta budaya (Umam, 2024). Dalam konteks India, yang dikenal dengan keragaman agama dan budaya yang sangat kompleks, konflik antaragama tetap menjadi tantangan serius. Berbagai laporan menunjukkan adanya ketegangan dan kejadian kekerasan antara komunitas Muslim dan

Hindu, seperti yang diungkapkan oleh seorang warga Muslim yang mempertanyakan nasibnya setelah mengalami penganiayaan dan diskriminasi seperti yang di beritakan pada laman berita "*religion and ethict newswweekly*" dari laporan seorang muslim sambil bertanya, "*beritahu kami kemana kami bisa pergi? mereka mengambil Al-Qur'an kami, melemparkannya ke jalan dan mengencinginya. Mereka menyuruh kami untuk keluar dari negara ini padahal kami lahir disini, dan rakyat-rakyat kami berjuang untuk negara ini. Lalu kemana kami bisa pergi?*" ujarnya. Juga laporan dari seorang yang bernama De Sam Lazaro "*Beberapa mil jauhnya, sebuah keluarga Hindu berduka atas kehilangan putra dan saudara laki-laki mereka, yang dibunuh oleh geng Muslim. Dia adalah aktivis pemuda untuk dewan Hindu dunia, sebuah kelompok nasionalis Hindu.*" Ujar seorang aktifis Hindu (Weekly, 2002) ("*Testimoni warga Muslim di India mengenai diskriminasi dan kekerasan sektarian.*" 2020) maupun pengalaman keluarga Hindu yang kehilangan anggota akibat konflik sektarian (Lazaro, 2002).

Sejarah konflik agama di India berakar pada masa penjajahan Inggris yang menerapkan kebijakan pemecah belah (*divide and rule*) untuk melemahkan solidaritas antara umat Hindu dan Muslim. Kebijakan ini menimbulkan ketidakharmonisan yang memicu perseteruan berkepanjangan, yang kemudian berkontribusi pada pembagian India dan Pakistan pada tahun 1947 serta konflik wilayah Kashmir yang berlangsung hingga saat ini (S. Nugroho, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketegangan sektarian tidak hanya berdampak pada pemisahan sosial, melainkan juga mengancam keamanan nasional dan stabilitas wilayah (Monica, Ayunda, Rhoma, Aria, & Pd, n.d.).

Namun demikian, berbagai upaya integrasi sosial telah dan terus dilakukan sebagai respons terhadap konflik agama tersebut. Integrasi ini mencakup dialog lintas agama, inisiatif kerja sama sosial, dan program edukasi pluralisme yang bertujuan memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman. Organisasi masyarakat sipil dan tokoh agama berperan penting dalam menggerakkan proses rekonsiliasi dan membangun jembatan komunikasi antar komunitas, sehingga mendorong toleransi dan mengurangi stereotip negatif (Bhargava, 2007). Sejumlah program dan gerakan sosial juga telah dilakukan di India untuk mendorong integrasi sosial dan meredam konflik agama. Diantaranya adalah:

1. Dialog Antar Agama dan Forum Perdamaian

Lembaga-lembaga seperti *Interfaith Dialogue Forums* dan organisasi masyarakat sipil secara rutin mengadakan pertemuan lintas agama yang melibatkan tokoh Hindu, Muslim, Sikh, dan Kristen. Forum ini bertujuan meningkatkan saling pengertian, mengatasi stereotip negatif, dan membangun toleransi melalui diskusi (Setyorini, 2014, hal. 99) terbuka dan kolaborasi sosial dalam berbagai proyek komunitas (Sunder, 2018, hal. 67–88).

2. Program Pendidikan Pluralisme dan Toleransi di Sekolah

Pemerintah India bersama LSM menginisiasi program pendidikan yang menekankan nilai-nilai pluralisme, menghargai keberagaman agama, serta mengajarkan sejarah budaya bersama. Program ini diimplementasikan di berbagai daerah yang rawan konflik sektarian untuk membangun kesadaran sejak dini agar generasi muda menjadi agen perdamaian (Kumar, R., & Desai, 2020, hal. 102–109).

3. Gerakan Perdamaian Komunitas Lokal

Di beberapa wilayah konflik tinggi, tokoh masyarakat dan agama bekerja sama mengorganisasi kegiatan sosial bersama seperti gotong royong, perbaikan fasilitas umum, dan perayaan budaya bersama lintas agama. Kegiatan ini mampu memperlerat jalinan hubungan antar komunitas dengan berbagi tujuan dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari (Singh, A., & Patel, n.d.).

4. **Mediasi dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah**  
Pemerintah India dan beberapa NGO mengembangkan metode mediasi berbasis komunitas yang melibatkan perwakilan dari kelompok agama yang berseteru. Proses mediasi ini bertujuan mencari solusi damai serta mencegah eskalasi kekerasan sektarian dengan pendekatan dialog yang konstruktif dan negosiasi yang inklusif (Sharma, P., & Gupta, 2021, hal. 425).

Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk membangun integrasi sosial dan mengatasi akar konflik agama di India sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan dan bukan sumber perpecahan. Transformasi hubungan sosial di India juga memerlukan pemahaman atas dinamika sektarianisme yang melibatkan perbedaan agama, kasta, dan budaya. Kekerasan sektarian yang dahulu terfokus di perkotaan kini telah meluas hingga ke wilayah pedesaan. Statistik pemerintah menunjukkan peningkatan konflik sektarian pada akhir 1980-an, dengan puncaknya tragedi nasional seperti kerusuhan akibat penghancuran kuil di Ayodhya pada tahun 1992 yang menewaskan ribuan orang (Hu, A., & Tian, 2015). Kejadian tersebut menjadi titik penting yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius mengupayakan rekonsiliasi sosial.

Salah satu ciri khas integrasi sosial di India adalah adanya upaya simultan dalam menangani ketegangan sektarian melalui pendekatan legal, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat. Faktor politik yang mendorong nasionalisme ekstrem menambah kompleksitas situasi, namun keberadaan gerakan perdamaian lintas agama menjadi faktor penyeimbang yang berupaya meredakan kekerasan serta membangun solidaritas yang inklusif (Appadurai, 2022). Dengan demikian, integrasi sosial di India bukanlah akibat langsung dari konflik agama, melainkan usaha aktif dan strategis yang dilakukan berbagai pihak untuk mengatasi konflik, memperkuat persatuan, dan mendorong kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keragaman agama, budaya, dan kelompok sosial. (Gudavarthy, 2022).

### **Tindakan Pemerintah**

India adalah negara sekular dengan pemerintahan yang menghindari agama. Tetapi pemerintah India memiliki Kementerian Urusan Minoritas (*Ministry of Minority Affairs*) dan Komisi Nasional untuk Minoritas, yang menangani pemeluk agama non-Hindu dan menjamin hak mereka untuk beragama (Ulum, 2018). Kementerian Urusan Minoritas ini banyak upaya yang dilakukan oleh kementerian ini untuk mendukung pendidikan minoritas, Dalam periode rencana lima tahunan, alokasi anggaran diprioritaskan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi kelompok minoritas seperti Muslim, Kristen, Sikh, dan lainnya yang secara historis kurang diuntungkan (Hasan, 2022). Beberapa upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya

berbagai perpecahan telah diupayakan berdasarkan wawasan yang diperoleh, terdapat beberapa strategi penyelesaian konflik:

1. Mendorong tata kelola yang inklusif dan keterwakilan yang adil  
Pemerintah mendorong keterlibatan berbagai komunitas dalam ranah politik agar perwakilan mereka lebih proporsional dan mampu mengurangi marginalisasi. Dengan inklusivitas politik, kelompok minoritas merasa diakui dan memiliki suara dalam pembentukan kebijakan, yang secara signifikan mencegah rasa terasing dan konflik sosial. Langkah ini memperkuat stabilitas sosial politik dan menjamin keadilan hak-hak sipil bagi semua lapisan masyarakat (Arlen, 2023).
2. Investasi pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah terpinggirkan  
Pemerintah melakukan investasi khusus di sektor pendidikan melalui pendirian sekolah, perguruan tinggi, beasiswa, dan program pengembangan kapasitas bagi komunitas mundur, terutama minoritas Muslim yang selama ini mengalami ketertinggalan pendidikan. Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesenjangan ekonomi dapat diefisienkan, yang pada gilirannya mendorong integrasi sosial yang lebih kuat. Contohnya adalah program Maulana Azad National Fellowship yang membantu ribuan siswa minoritas melanjutkan pendidikan tinggi.
3. Dialog antaragama dan inisiatif akar rumput.  
Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat turut mendorong dialog lintas agama dan pertukaran budaya sebagai strategi utama membangun toleransi dan saling pengertian. Program-program yang menstimulasi interaksi sosial antar komunitas agama dapat mengikis prasangka dan stereotip yang menjadi faktor pemicu konflik. Inisiatif ini memperkuat kohesi sosial masyarakat multikultural India dan mengembangkan kultur damai yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama yang harmonis (Arlen, 2023).

Namun dari berbagai upaya yang telah dilakukan, beberapa partai politik bahkan menjadi penyebab terbesar kerusuhan antar agama terjadi. Partai Kongres India (INC) dan Liga Muslim Seluruh India (Muslim Liga). Partai-partai ini masing-masing dihadapkan pada ideologi yang berlawanan, yang pada akhirnya mengakibatkan kekuasaan India terpecah menjadi dua negara merdeka yaitu India dan Pakistan. Perbedaan antara Hindu dan Muslim menjadi masalah yang berkelanjutan di India dan masih menjadi sorotan saat ini. Besarnya kekerasan yang terus-menerus terungkap sebagian dari kerusuhan di New Delhi tahun 2020. Ketegangan muncul ketika pemerintah India memperkenalkan undang-undang kewarganegaraan India yang kontroversial, para pendukung undang-undang tersebut sebagian besar beragama Hindu (Ahmed, 2021).

Seperti gejolak kasus mengenai AMU (*Alighart Muslim University*), AMU merupakan sebuah institusi yang memiliki kepentingan nasional harus mencerminkan “struktur nasional”, kata Pusat tersebut kepada Mahkamah Agung pada hari Selasa sambil menunjukkan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen mahasiswa yang belajar di Universitas Muslim Aligarh (AMU) adalah Muslim bahkan tanpa syarat (NDTV, 2024). Tujuh hakim konstitusi di Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua Hakim DY Chandrachud memulai sidang mengenai masalah ini mulai Selasa, 9 Januari 2024. Dalam pengajuan tertulisnya yang diajukan ke pengadilan tertinggi, Pusat mengatakan AMU tidak bisa menjadi lembaga minoritas mengingat “karakter nasionalnya”. Dikatakan bahwa AMU bukanlah dan tidak

dapat menjadi universitas dengan agama atau denominasi agama tertentu, karena universitas mana pun yang telah dinyatakan sebagai lembaga kepentingan nasional tidak dapat menjadi lembaga minoritas (India, 2024). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum Muslim yang hendak menempuh pendidikan yang mendalam, pasalnya kuota 50% kursi bagi komunitas Muslim juga akan dihapus sehingga calon mahasiswa harus memperebutkan kursi dengan berbagai kalangan agama terutama Hindu yang dikategorikan penganut terbanyak.

Konstitusi India secara tegas menyatakan bahwa negara menganut sekularisme, yang berarti negara tidak memandang rendah atau terlibat dalam pengakuan iman dari semua agama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama akan dikembalikan kepada pemeluk dan lebharganya (Ulum, 2018). Namun yang terjadi dari sebuah laporan seorang Muslim di sana, berdasarkan unggahan video pemimpin agama Hinduyang menyerukan pembunuhan masal dan penggunaan senjata terhadap umat Islam yang menjadi viral di media sosial. Kejadian ini membuat Mahkamah Agung melakukan penyelidikan atas perilaku kebencian di negara bagian Uttarkhand. Namun setelah diselidiki juru bicara pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, menolak laporan *Genocide Watch*, dengan mengatakan "tidak ada hal-hal yang digambarkan" (Fareed, 2022). Dari beberapa laporan tersebut terdapat beberapa usaha pemerintah dalam meminimalisir adanya pertentangan antaragama namun dari pemerintah dalam seperti partai politik masih membedakan atauran keberagamaan sehingga beberapa kejanggalan antar agama masih tetap terjadi

## **Simpulan**

Penelitian ini mengungkap dinamika kompleks hubungan antaragama di India pasca runtuhnya Dinasti Mughal (1556-1605), di mana kelompok minoritas agama mengalami marginalisasi akibat ketidakstabilan politik yang berdampak konflik antara komunitas Hindu dan Muslim. Meski berbagai upaya integrasi sosial oleh pemerintah dan masyarakat telah dilakukan, seperti dialog lintas agama, pendidikan multikultural, dan reformasi hukum, konflik agama masih sering muncul dikarenakan faktor perbedaan ideologi, keyakinan, persaingan politik, dan warisan kolonial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi sosial berperan krusial dalam meredam ketegangan sektarian melalui pendekatan yang holistik, meliputi dialog antaragama untuk membangun pemahaman, pendidikan pluralisme yang menumbuhkan toleransi, serta kebijakan hukum yang adil dan inklusif. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, sehingga dibutuhkan solusi inovatif dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kontribusi kajian ini terletak pada penegasan bahwa penyelesaian konflik agama harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, bukan semata mengandalkan tindakan represif, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang mendalami intervensi praktis rekonsiliasi sosial dan model-model integrasi yang adaptif sesuai konteks multikultural di India dan wilayah serupa.

## **Daftar Rujukan**

Ahmed, S. (2021). Hindu-Muslim Fragmentation: A Consequence Of India's Colonial Legacy. *Human Right Pulse*. Diambil dari

<https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/hindu-muslim-fragmentation-a-consequence-of-indias-colonial-legacy>

- Appadurai, A. (2022). Modi's India Has Now Entered Genocidalism, the Most Advanced Stage of Nationalism. *The Wire*. Diambil dari <https://thewire.in/politics/narendra-modi-india-genocidalism>
- Arlen, B. (2023). Ethnic and Religious Conflicts in India: A Comprehensive Analysis. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 228–237. Diambil dari <https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/741/683>
- Bhargava, R. (2007). Political Violence and Religious Conflict in India. *Asian Journal of Political Science*, 15(3), 234-250.
- Fareed, R. (2022). Expert warns of impending 'genocide' of Muslims in India. *Al-Jazeera*. Diambil dari <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/16/expert-warns-of-possible-genocide-against-muslims-in-india>
- Fatimah, F. N., & Basri, M. (2022). The Development of Islam in The Mughal Time. *rihlah*, 10(02), 103–118. Diambil dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/download/34643/18354/>
- Gudavarthy, A. (2022). Indian sectarianism: The cultural and the political. *The Foreign Policy Centre*. Diambil dari <https://fpc.org.uk/indian-sectarianism-the-cultural-and-the-political/>
- Hannah Ellis-Petersen and Ahmer Khan. (2022). *'They cut him into pieces': India's 'love jihad' conspiracy theory turns lethal*. Diambil dari <https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/they-cut-him-into-pieces-indias-love-jihad-conspiracy-theory-turns-lethal>
- Hasan, Z. (2022). Other Backward Classes and the politics of reservations in India Past and present. *United Nations University World Institute for Development Economics Research*, (November), 1–16.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1999). *Sociology McGraw-Hill*.
- Hu, A., & Tian, H. (2015). The Ayodhya Conflict and Its Aftermath. *Journal of Peace Research*, 52(4), 503–517.
- India, O. (2024). *The Legal Dispute Over Aligarh Muslim University's Minority Status Explained*. Diambil dari <https://www.outlookindia.com/national/the-legal-dispute-over-aligarh-muslim-university-s-minority-status-explained-news-342435>
- Kumar, R., & Desai, M. (2020). Education for Pluralism: Initiatives in Indian Schools. *International Journal of Educational Development*, 74, 102–109.
- Lazaro, D. S. (2002). Report on Hindu-Muslim violence in India. *Religion and Ethnic Newsweekly*.
- Lubis, D. E., Muhajir, A., Dahlan, Z., & Utara, I. S. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India. *Islamic Education*, 1(2), 41–47. Diambil dari <http://journal.medanresourcecenter.org/index.php/IE>
- Monica, O. :, Ayunda, K., Rhoma, D., Aria, D., & Pd, M. (n.d.). *Konflik India Dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970)*.
- NDTV. (2024). *On Aligarh Muslim University's Minority Status, Centre's "National Structure"*

- Argument*. Diambil dari <https://www.ndtv.com/india-news/on-aligarh-muslim-universitys-minority-status-centres-national-structure-argument-in-supreme-court-4961067>
- Nugroho, I. S. (2019). Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan Historis Peran Ali Jinah. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 201–218. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JSQ.015.2.04>
- Nugroho, S. (2019). Pergolakan Politik dan Agama di India: Perspektif Sejarah. *Jurnal Studi Asia*, 12:2, 45–60.
- Putri, E. (2019). Tinjauan historis pemerintahan dinasti mughal pada masa pemerintahan sultan akbar tahun 1556-1605 M. *Swarnadwipa*, 3, 159–171. Diambil dari <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/swarnadwipa/article/download/1960/1237>
- Ramadhan, H. G., Khadijah, M., Islam, U., Antasari, N., Waliyullah, S., Khan, S. A., ... Khan, S. A. (2023). Pemikiran Modern Islam dan Kontemporer : Pola Pembaharuan Islam di India. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, 278–283. Diambil dari <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Rodhiyah, S., Dahlan, Z., Islam, U., Sumatera, N., Artikel, I., & Islam, K. P. (2023). Turki Ustmaniyah, Safawiyah dan Mughal: Kemandekan Peradaban Islam. *Saniya Institute*, 1–16. Diambil dari <https://jurnal.saniya.id/>
- Setyorini, F. S. (2014). *Konflik sunni dan syiah di india pada masa sultan akbar 1556-1605*.
- Sharma, P., & Gupta, S. (2021). Community Mediation in India: Strategies to Resolve Sectarian Conflict. *Conflict Resolution Quarterly*, 38(4), 423–440.
- Singh, A., & Patel, K. (n.d.). Community-Led Peacebuilding Efforts in Conflict Zones of India. *Asian Journal of Social Science*, 47(3), 301–320.
- Sunder, M. R. (2018). Interfaith Dialogue and Peacebuilding in India. *Journal of Peace and Conflict Studies*, 25(1), 67–82.
- Testimoni warga Muslim di India mengenai diskriminasi dan kekerasan sektarian. (2020). *Religion and Ethnic Newsweekly*.
- Ulum, R. (2018). Institusi minoritas dan struktur sosial di india. *Harmoni*, 8–27. Diambil dari <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/289/224/710>
- Umam. (2024). Pengertian Integerasi sosial. Diambil dari [https://www.gramedia.com/literasi/integrasi-sosial/#3\\_Hendropuspito](https://www.gramedia.com/literasi/integrasi-sosial/#3_Hendropuspito)
- Weekly, religion and ethict news. (2002). Hindu Muslim Conflict In India. *Public Bordcasting Service*. Diambil dari <https://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2002/05/24/may-24-2002-hindu-muslim-conflict-in-india/12044/>
- Wisnu, R. (2023). Sejarah Penyebaran Islam di India dan Hubungannya dengan Islam Nusantara. *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 01, 49–67. Diambil dari <https://ejournal.iainponorogo.ac.id?index.php/jusan>
- Yunariono, B. (2023). Konflik Umat Hindu - Muslim di India Era Pemerintahan Narendra Modi. *Paradigma: Jurnal masalah sosial, politik dan kebijaksanaan*, 27(2), 219–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/>